

ARSITEKTUR SEBAGAI MANIFESTASI IDENTITAS INDONESIA

Johannes Adiyanto¹

¹Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32
Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
*johannesadiyanto@ft.unsri.ac.id

Diterima: 17-03-2021

Direview : 09-06-2021

Direvisi : 20-10-2021

Disetujui: 23-11-2021

ABSTRAK. Arsitektur secara umum dipahami sebagai ilmu bangunan. Namun bagaimana latar belakang munculnya pemikiran arsitektur terutama dalam perspektif politik dan kebangsaan tidak banyak di bahas. Paper ini melihat bagaimana suatu bangsa – dalam hal ini Indonesia – menempatkan arsitektur sebagai sebuah identitas kebangsaannya. Kasus waktu yang dipakai dalam paper ini adalah masa pemerintahan Sukarno, Suharto dan Joko Widodo. Pembacaan kasus arsitektur menggunakan cara baca semiotika, yang menempatkan karya arsitektur sebagai simbol yang dipersepsi oleh penerima simbol tersebut. Metode penulisan menggunakan metode sejarah yang sinkronik dan diakronik.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari ketiga Presiden Indonesia tersebut menempatkan 'arsitektur' sebagai simbol identitas. Arsitektur diposisikan sebagai sarana komunikasi terhadap kebijakan-kebijakan politik identitasnya. Perbedaan dari ketiganya adalah lebih pada pendekatan arsitektur yang digunakan. Masa Presiden Sukarno menggunakan arsitektur modern sebagai sarana mempersatukan keberagaman arsitektural dan menunjukkan jati diri kesetaraan dengan bangsa lain. Hal yang penting sebagai salah satu negara yang baru merdeka saat itu. Masa Suharto justru sebaliknya menempatkan keberagaman arsitektural sebagai identitasnya atau menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme, walau dengan pendekatan sentralistik dalam kebijakan politiknya dengan perundang-undangan yang mengikat. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan keberagaman arsitektur namun dalam kemasan yang lebih mengkinis dengan istilah arsitektur nusantara mengkinis. Disini terlihat bahwa arsitektur dimaknai sesuai dengan pemimpin yang berkuasa saat itu. Arsitektur menjadi mempunyai kaitan erat dengan pemilihan pendekatan politik saat pemerintah itu berkuasa.

Kata kunci: *Perkembangan Arsitektur, Indonesia, Politik Identitas, Semiotika, dan Sinkronik – Diakronik*

ABSTRACT. *Architecture is generally applied as building science. However, how the background of architectural thought, especially from the perspective of politics and nationality, is not widely discussed. This paper examines how a nation - in this case, Indonesia - places architecture as a national identity. The time case used in this paper is the reign of Sukarno, Suharto, and Joko Widodo. The reading of architectural cases uses the semiotic reading method, which places architectural works as a symbol that the recipient of the symbol perceives. The method of writing uses a synchronic and diachronic method of history.*

The discussion results show that the three Indonesian Presidents place "architecture" as a symbol of identity. Architecture is positioned as a means of communication toward the political policies of its identity. The difference between the three is more in the architectural approach used. President Sukarno used modern architecture to unify architectural diversity and show equality of identity with other nations. It was important as a newly independent country at that time. The Suharto era, on the contrary, placed architectural diversity as its identity or used an architectural approach to regionalism, albeit with a centralistic approach in its political policies with binding legislation. The Joko Widodo administration uses architectural diversity but in a more contemporary form with the term modern archipelago architecture. Here, architecture is interpreted according to the ruling leader at that time. Architecture is closely related to the choice of political approach when the government is in power.

Keywords: *architectural history, Indonesia, identity politics, semiotic, synchronic-diachronic*

PENDAHULUAN

Dalam pengantar buku *Rethinking Architecture*, Neil Leach menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah produk dari cara berpikir (Leach, 1997). Hal yang menarik adalah apa latar belakang pengembangan 'cara berpikir arsitektural tersebut? Ada banyak faktor yang bisa disebutkan dan disematkan dalam proses berpikir untuk terwujudnya sebuah karya arsitektur. Namun pembacaan juga bisa dibalik, cara berpikir arsitektural bisa mempengaruhi sebuah pendekatan bidang ilmu lainnya. Abdoul Maliq menyatakan bahwa arsitektur melibatkan kemungkinan-kemungkinan terhadap relasi antara manusia dengan hal-hal, yang tidak hanya bersifat stabil/teknis, namun hal-hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga arsitektur menjadi sedemikian mudah dipengaruhi. Dalam kasus yang dijabarkan Abidin Kusno jelas terlihat bahwa ada keterkaitan antara kekuasaan dengan visualisasi arsitektural sehingga arsitektur ditempatkan sebagai subyek teknologi kekuasaan (Simone, 2012). Lebih mendalam Fahime Yari mempertegas bahwa arsitektur dapat digunakan sebagai 'pembawa pesan' kepada pengguna bangunan dan hal ini berkembang dari waktu ke waktu sehingga pada tataran yang lebih luas yaitu '*nation brand*' yang menggunakan strategi menggunakan simbol-simbol untuk menekankan kekhasan suatu bangsa yang dilihat oleh publik asing (Yari & Mansouri, 2017). Inilah dasar paper ini melakukan eksplorasi pemikirannya.

Pembacaan arsitektur dari sudut pandang politik, terutama politik identitas telah dilakukan Kemas Ridwan Kurniawan yang mendasari pemikirannya dari ketidaknyaman terhadap pencarian jati diri arsitektur Indonesia, yang dalam pemikirannya justru membuat belenggu yang menyesatkan dan terkadang justru melupakan akar permasalahan yang sesungguhnya dalam konteks sosial budaya. Lebih lanjut Kurniawan menyatakan tentang definisi identitas adalah suatu proses budaya yang tidak pernah berhenti (incomplete) dan bergantung pada situasi dan dinamika aspek sosial budaya (Kurniawan, 2018). Paper ini menggunakan pemikiran Kurniawan ini sebagai landasan pemahaman 'identitas' terkait dengan arsitektur.

Rentang waktu yang digunakan adalah masa pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Suharto dan Presiden Joko Widodo. Hal yang mendasari pemilihan ketiganya dari tujuh

Presiden yang pernah memimpin Indonesia adalah kejelasan arah pembangunan dan juga bukti-bukti arsitektural yang mengarah pada satu pendekatan arsitektural pada masing-masing pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode paper ini mengacu pada metode sinkronik-diakronik yang berasal dari ilmu pengetahuan bahasa, dengan pemahaman bahwa sinkronik mengacu pada dimensi ruang yang menekankan pada struktur dan fungsi, sedangkan diakronik mengacu pada dimensi waktu yang menekankan pada proses dan durasi (Adiyanto, 2018). Namun metode ini mempunyai titik lemah pada komparatif-historis (Pangarsa, 2006). Hal inilah yang mendorong penggunaan pendekatan semiotika untuk dapat melakukan studi komparatif secara sudut pandang kesejarahan. Dalam kegiatan membaca aspek arsitekturalnya, paper ini menggunakan cara baca semiotika. Semiotika adalah sebuah telaah tanda dan perilaku penggunaan tanda yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure (Britannica, 2020). Pada paper ini arsitektur ditempatkan sebagai obyek semiotic yang dimaknai oleh penanda melalui aspek-aspek yang mempengaruhi terbentuknya obyek semiotic (Pellegrino, 2006).

Tahapan kerjanya sebagai berikut:

- Tahap pertama, setiap masa pemerintahan Presiden yang menjadi obyek amatan, fenomena arsitektural baik yang terbangun maupun dalam bentuk kebijakan atau fenomena yang lain disusun secara tahapan kurun waktu yang diakronik.
- Tahap kedua, fenomena arsitektural yang telah tersusun secara linimasa yang diakronik akan dibahas secara sinkronik terhadap fenomena perkembangan arsitektural secara global, hal ini untuk mendapatkan korelasinya antara perkembangan arsitektural di Indonesia dengan perkembangan di dunia.
- Tahap terakhir adalah tahap interpretasi dan mengkaitkan ketiga tokoh Presiden untuk mendapatkan keterkaitan ketiganya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Sukarno

Ardhiati menyatakan bahwa yang dilakukan Sukarno terhadap perombakan tata kota Jakarta lengkap dengan bangunan-bangunannya saat tahun 1960an bisa diseterakan dengan fenomenanya dengan Hitler di Jerman, Stalin di Uni Soviet,

Kubitchek di Brasil dan Mao Tze Dong di RRC, yang menempatkan arsitektur sebagai manifestasi politiknya (Ardhiati, 2013). Ardhiati lebih dalam lagi menjabarkan persamaan tokoh-tokoh pemimpin negara saat itu dalam hal pendekatan arsitektural yang digunakan dalam mewujudkan representasi negaranya; Hitler melakukan pengubah gaya Fuhrer, Stalin mengubah Gothic Stalinist, Nehru mengubah kota modernnya yaitu Chandigarh, Kubitchek mengubah kota Brazilia; sedangkan Sukarno mengubah gaya perbaduan arsitektur modern dengan simbol-simbol khas Jawa kuno (Ardhiati, 2012).

Hal yang menarik untuk ditelusur lebih lanjut, mengapa Sukarno menempatkan arsitektur modern sebagai dasar pendekatan arsitekturalnya? Ardhiati menjelaskan beberapa hal yang bisa diinterpretasikan sebagai dasar alasan mengapa Sukarno menempatkan arsitektur modern menjadi dasar pemahaman arsitekturalnya. Sukarno mengoleksi buku biografi dari Frank Lloyd Wright dan buku 'Arsitektur Modern' disamping itu juga terungkap bagaimana proses awal mula Sukarno berpraktek sebagai arsitek yang karya-karya Sukarno dipengaruhi oleh gaya arsitektur Wolff Schoemaker. Proses berarsitektur Sukarno juga mengalami proses perkembangan, pada masa awal Sukarno lebih banyak menggunakan atap bergaya arsitektur Eropa, dan pada periode berikutnya memadupadankan antara atap khas Indonesia dengan arsitektur modern dan pada periode akhir, Sukarno memahami arsitekturnya dengan gaya *International style* dengan dekorasi budaya Jawa (Ardhiati, 2005). Periodisasi perjalanan pemahaman arsitektural Sukarno dari Ardhiati terbagi menjadi tiga periode yaitu periode awal/pertama antara tahun 1926-1945 yang disebut sebagai periode murid sang Profesor, yang menempatkan Wolff Schoemaker sebagai acuan berarsitekturnya sebab Schoemaker adalah dosen Sukarno untuk matakuliah Menggambar Arsitektur di TH Bandoeng. Disinilah pengaruh Schoemaker melandasi kegiatan berarsitektur Sukarno. Periode kedua yang berlangsung tahun 1945 – 1959 adalah saat awal Sukarno menjabat sebagai Presiden. Disini Sukarno melakukan eksplorasi budaya dalam negeri yang kemudian terwujudnya dalam artefak padma atau bunga teratai. Dengan banyaknya ditemukan artefak padma yang terkait dengan Sukarno, maka periode ini dinamakan periode Sang Padma, sang Arsitek. Periode terakhir berlangsung dari tahun 1959 – 1965, yang merupakan puncak karier Sukarno sebagai

Presiden RI. Pada masa ini Sukarno mempunyai cita-cita untuk mempersatukan dunia ketiga di tata dunia. Dengan landasan ini maka Sukarno menempatkan gaya *International style* sebagai perwujudan dari kebanggaan nasional di mata dunia. Ardhiati bahkan secara lugas dan tegas menyatakan bahwa Sukarno melalui arsitektur mengadopsi gaya *international style* untuk mendapatkan citra Indonesia yang modern. Dengan cara pandang Sukarno yang menuju internasionalisme dan bekal modal program dana pampasan perang Jepang yang kemudian diwujudkan dalam beberapa proyek, yang kemudian dikenal dengan proyek mercusuar, maka periode ketiga yang berlangsung tahun 1959-1965, oleh Ardhiati diberi nama sebagai periode Sang Maestro (Ardhiati, 2005). Disisi lain Kebijakan Sukarno tentang *Nation and Character Building* yang mulai dicanangkan sekitar tahun 1960, yang terwujudnya dalam pendekatan *international style* dalam gaya bangunan, juga mengikutsertakan industri pendukungnya. Pabrik Semen Gresik yang diresmikan tanggal 7 Agustus 1957 merupakan industri yang mendukung program-program pembangunan Sukarno dengan pendekatan arsitektur modern, sekaligus menunjukkan modernitas bangsa Indonesia. Hal ini juga sebagai bukti nyata bahwa bangsa Indonesia mempunyai kemampuan yang setara dalam kemampuan teknologi modern – saat itu – dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Hanum et al., 2020). Sukarno mempunyai arsitek-arsitek kepercayaan. Ardhiati menyebutkan dua nama yaitu Soejoedi yang merancang Gedung Conefo dan F. Silaban yang merancang cukup banyak bangunan hasil arahan Sukarno (Ardhiati, 2005). Sukada dalam penjelasannya menyatakan bahwa Soejoedi menerapkan program perancangan arsitektur *international style* yang terbentuk dari tiga prinsip yaitu volumetrik, keteraturan dan anti-ornamen terapan; yang kemudian terealisasi dalam wujud kotak sebagai benda berongga yang dibentuk dari enam bidang teratur-presisi sehingga wujud obyek yang tidak termasuk dalam bidang bidang tadi merupakan bagian yang ditambahkan kemudian. Kerangka acuan kerja sayembara Conefo ini adalah sebuah *political venue* di Jakarta yang sesuai dengan keperibadian Indonesia. Dalam proses desainnya, Soejoedi mengikuti pola pikir Le Corbusier dalam proses perancangan *League Of Nation* (1927), dan *Palace Of The Soviets* (1931) yang mewadahi kegiatan di kompleks *political venue* ke dalam massa bangunan yang berbeda. Sukada juga kemudian mencatat bahwa wujud cangkang merupakan

perwujudan dari konsep naungan yang merupakan prinsip arsitektur vernacular Indonesia, sebab bidang batasnya adalah bidang kaca sehingga juga dapat dipandang sebagai penerapan konsep *jagad cilik* dan *jagad gede* (Sukada, 2011). F. Silaban sebagai salah satu tokoh arsitek masa pemerintahan Sukarno dengan lugas dan tegas menyatakan bahwa "...tidak perlu lagi dicari-cari bentuk arsitektur Indonesia sebab manusia Indonesia itu sendiri masih dalam proses pembentukan. Yang jelas arsitektur Indonesia itu harus modern dan harus bersifat tropis" (Silaban, 1982).

Deskripsi diatas terhadap Soejoedi dan F. Silaban menunjukkan bahwa arsitektur modern digunakan untuk menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia, namun bukan arsitektur modern yang anti-ornament (jargon ornament is crime) namun menempatkan ornament pada fungsi penghias ruang, dan mengembangkan konsep-konsep 'bersih' / *cleanness* berdasar pada konsep vernakular (kasus Gedung Conefo dari Soejoedi) atau konsep tropikalitas (kasus karya F. Silaban). Arsitektur modern bertransformasi dengan konsep-konsep lokal. Terdapat proses adaptasi terhadap pemahaman dasar arsitektur modern yang dikembangkan di Eropa/Amerika.

Masa Suharto

Pemerintahan Suharto secara resmi sebagai Presiden ke-2 menggantikan Sukarno tanggal 27 Maret 1968 pada sidang MPR; yang sebelumnya telah menjadi pejabat Presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967 (Fitra, 2020). Pemerintahan Suharto secara kebijakan politik bertolak belakang dengan pemerintahan Sukarno yaitu dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Presiden Suharto memulihkan hubungan dengan dunia barat, sehingga dana bantuan asing dapat masuk ke Indonesia, dan memilih gaya pemimpin yang otoliter ("Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter," n.d.) demi keamanan dan stabilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi negara, pemerintahan Suharto dapat terbagi menjadi 3 periode ("Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia," n.d.), yaitu:

1. Periode Pemulihan Ekonomi dari tahun 1966 – 1973. Pada tahapan ini Indonesia bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), UN (United Nation/Persatuan Bangsa-Bangsa) dan Bank Dunia. Presiden Suharto juga mengandalkan teknokrat ekonomi lulusan Amerika Serikat untuk menanggulangi

masalah hiperinflasi saat itu. Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968) yang keduanya memberi kemudahan berinvestasi di Indonesia, yang terbukti membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% pada tahun 1968.

2. Periode Percepatan Ekonomi (1974-1982) melalui intervensi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi makin cepat karena pengaruh dari oil boom ada tahun 1970an. *Oil boom* pertama terjadi pada tahun 1973/74 yang meningkatkannya harga minyak karena kesepakatan anggota OPEC (Organization of Petroleum-Exporting Countries) untuk memotong eksport minyaknya. *Oil boom* kedua terjadi tahun 1978/79 saat terjadi revolusi Iran yang membawa dampak pada produksi minyak di Iran sehingga membawa efek pada kenaikan harga minyak. Di masa ini berdampak pada pendapatan Indonesia yang meningkat tajam sehingga investasi-investasi public yang penting dalam pembangunan daerah, pembagnunan sosial, infrasturktur dan pendirian industri-industri (dalam skala besar) membawa konsekuensi makin bsar pendapatan devisa negara. Namun hal ini juga membawa dampak negative, perlakuan terhadap masyarakat pribumi terabaikan yang menjadi pemicu kerusuhan Malari tahun 1974. Kerusuhan ini berdampak pada perubahan kebijakan yang mengetatkan investasi asing, karena efek dari *oil boom* tersebut diatas, Indonesia mampu berdiri sendiri.
3. Periode Ekspor dan Deregulasi (1983-1996). Setelah Indonesia mendapat pemasukan yang luar biasa karena pengaruh harga minyak yang melonjak tajam di periode sebelumnya, justru di periode ini berangkat dari jatuhnya harga minyak dunia sekitar awal 1980an, yang membawa dampak meningkatnya utang luar negeri Indonesia di tahun 1985. Perekonomian Indonesia kemudian diatur kembali yang sebelumnya bergantung pada minyak kemudian berubah diarahkan ke sector swasta terutama yang berorientasi ekspor. Efeknya investasi asing yang mengarah ke ekspor mendapatkan perlakuan khusus. Namun fokus pemerintah pada pertumbuhan ekonomi membawa dampak kesenjangan sosial yang juga diperburuk dengan krisis finansial akhir 1990an. Ujung dari permasalahan sosial politik tersebut membawa pada kejatuhan Suharto di tahun 1998.

Lalu apa kaitannya karakter pemerintahan Suharto yang otoliter dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang dijabarkan diatas, lalu juga sikap Suharto yang anti-Sukarno (Sitompul, n.d.) dengan bahasan arsitektur?

Marwati menjelaskan perbedaan antara Sukarno dan Suharto dalam konteks arsitektur dengan mengacu tulisan-tulisan Ardhiati bahwa Sukarno lebih mengacu pada pendekatan arsitektur modern, sedangkan Suharto mengacu pada pos-modern (Marwati, 2012).

Famihe Yari mengacu pada pendapat Lebbeus Woods yang menyatakan tentang pembiayaan/financial, sebagaimana sumber daya material, pemikiran, emosional dari seluruh anggota kelompok yang terlibat didalam suatu proyek; saat itulah terjadi perbincangan politik. Kemudian pertanyaan politiknya menjadi: bagaimana merubah keadaannya? Bagaimana mekanisme perubahan kehidupanmu? Ini tentang negosiasi (Yari & Mansouri, 2017). Dengan dasar pendapat inilah, paper ini mengembangkan pemikiran dari Marwati.

Fokus perhatian Suharto pada bidang ekonomi dan menggaet sebanyak mungkin investor luar untuk masuk ke Indonesia – sebagai konsekuensi keadaan saat itu - yang justru bisa dibaca secara arsitektural. Fasilitas-fasilitas apa yang ditawarkan serta bagaimana wujudnya?, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa kemudian dibaca secara semiotika arsitektur.

Sikap Suharto yang bertolak belakang dengan Sukarno juga membawa efek kepada pemilihan pendekatan arsitekturnya. Suharto pasti tidak menggunakan arsitektur modern. Maryati membacanya sebagai sebuah pendekatan post-modern, namun post-modern yang seperti apa?

TMII di gagas oleh Ibu Tien Suharto tanggal 13 Maret 1970 di depan rapat Yayasan Harapan Kita (YHK) dengan 'isi' berupa bangunan bercorak rumah adat lengkap dengan seni budayanya. Gagasan ini muncul atas dilatar belakang kunjungan kenegaraan ke pelbagai obyek wisata di luar negeri antara lain Disneyland di Amerika Serikat dan TimLand di Muangthai. Gagasan ini juga merupakan perwujudnya dari pidato Presiden Suharto tahun 1971 tentang keseimbangan pembangunan umum ("Tentang TMII," 2016). Gagasan ini kemudian disebar ke seluruh gubernur se Indonesia pada tanggal 31 Januari 1971 dalam bentuk proposal, agar 26 gubernur se Indonesia dapat membantu proses

pembangunan. Dalam *masterplan* terungkap bahwa 25% biaya pembangunan ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita, masing-masing kepada daerah setingkat Provinsi sebesar 16%, investor 45% dan badan-badan lain sebesar 14% (Hanggoro, n.d.).

Jika diperhatikan angka tahunnya, gagasan dan proses pembangunan TMII memang saat memasuki periode percepatan ekonomi, atau periode kedua dari perspektif ekonomi pemerintahan Suharto. Komposisi penyandang dana juga memperlihatkan peran investor cukup dominan. Hal yang berbeda pendekatan pembiayaan proyek pencitraan politis dibanding dengan masa pemerintahan Sukarno. Pendekatan arsitektur juga memperlihatkan perbedaan, yaitu mengedepankan keberagaman karya arsitekturnya, sebab di TMII ini diambil bangunan rumah adat yang mewakili provinsi di Indonesia yang berjumlah 27 provinsi saat itu. TMII kemudian diresmikan pada tanggal 25 April 1975 ("Tentang TMII," 2016). Hal yang kemudian diduga terkait adalah diterbitkan serial buku Arsitektur Tradisional sekitar tahun 1982-1983 dari tiap-tiap daerah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dakung, 1982) dan juga buku-buku lain yang merupakan hasil inventarisasi pengetahuan tradisional sebagai contoh buku berjudul *Pengetahuan Dalang* jilid 1 dan 2 yang ditulis oleh Poniran Sumarno dan Atot Rasona yang terbit tahun 1983 (Sumarno & Rasona, 1983). Deskripsi singkat diatas membuktikan bahwa pendekatan arsitektural Suharto adalah arsitektur tradisional.

Purnaya ketika membahas relasi kuasa dengan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua memaparkan kesejarahan dan latar belakang munculnya Kawasan Wisata Nusa Dua di Bali. Kawasan Nusa Dua digagas sejak awal tahun 1970an dengan menggunakan tenaga ahli dari Perancis yaitu SCETO yang menyusun master plan, sedangkan rencana detail di susun oleh Pacific Consultant International (PCI). Proses ini didanai oleh pinjaman dari Bank Dunia dan Asian Development Bank. Hotel pertama yang dibangun dan beroperasi adalah Nusa Dua Beach Hotel yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 1983. Pengembangan Kawasan hotel resort mewah di Nusa Dua ini menjadi proyek percontohan karena pada kurun waktu 1980-1990 membuktikan sebagai penyumbang devisa negara di luar migas yang saat itu sedang turun (Purnaya, 2015).

SCETO merekomendasikan tiga kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan turis namun dengan tetap menjaga keunggulan budaya dan alam dengan pendekatan pariwisata terbatas namun berkualitas. Ketiga kawasan *mass tourism* itu adalah Nusa Dua bagian selatan untuk, kawasan Sanur di bagian tengah dan Lovina di bagian utara; sedangkan diluar ketiga wilayah tersebut disarankan untuk dikembangkan wisata terbatas dengan hotel *boutique* berskala kecil untuk menjaga nilai-nilai budaya serta keasrian lingkungan lokal (Putra, 2015b). Disini terlihat ada usaha mengangkat nilai-nilai tradisi Bali ke dalam arsitektur, yang tentu dengan modifikasi modernitas untuk mengakomodasi aktifitas dan kenyamanan turisme.

Salah satu arsitek yang berperan dalam perkembangan masa Presiden Suharto dengan pendekatan yang lebih mengutamakan lokalitas adalah Robi Sularto, yang juga sebagai perancang Nusa Dua Hotel, dibawah biro Atelier Enam (Pranajaya, 2018). Atelier Enam dikenal dengan pendekatan yang beridentitas Indonesia, dan Robi Sularto merupakan seorang arsitek yang memahami secara mendalam arsitektur tradisional Indonesia (Putra, 2015a). Berbicara tentang Atelier Enam cukup menarik karena mereka: Yuswadi Saliya, Darmanwan Prawirohardjo, Nurrochman Sidharta, Imam Sunaryo, Robi Sularto dan Adhi Moersid adalah arsitek lulusan ITB yang merupakan murid dari van Romondt dan juga terlibat dalam proses pembangunan Gedung CONEFO dibawah Soejoedi (Purwestri & Widyarta, 2012). Walaupun masing-masing individu di Atelier Enam mengembangkan kekhususan masing-masing, namun karena ada *board of designers* yang dimotori oleh Yuswadi Saliya, maka kekhasan Atelier Enam sebagai sebuah biro arsitek terjaga yang kesemuanya berujung pada lokalitas tempat proyek-proyek mereka berada (Moersid, 2012).

Kasus lain yang terjadi pada masa pemerintahan Suharto adalah kasus Masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila. Yayasan ini berdiri tanggal 17 Februari 1982 yang didasari oleh semangat gotong royong di kalangan dermawan muslim dengan tujuan pembangunan tempat ibadah dalam hal ini masjid, yang sampai tahun 2009 telah berdiri 999-unit masjid. Masjid-masjid tersebut tersebar diseluruh Indonesia (33 provinsi) dan yang menjadi kekhasannya adalah desain atap bercungkup susun tiga yang dinyatakan sebagai bercorak masjid khas nusantara. Pertimbangannya adalah efisiensi biaya

dibanding dengan cor kubah, serta sebagai simbol kesejalinan antara Islam dengan budaya Nusantara (Nugraha, 2018). Contoh kasus arsitektural diatas menunjukkan pendekatan arsitektur masa pemerintahan Suharto berbasis arsitektur tradisional.

Masa Joko Widodo

Setelah Suharto turun dari jabatannya sebagai presiden 21 Mei 1998, memang terdapat Presiden BJ. Habibie sebagai Presiden ke 3 RI, lalu Abdurrahman Wahid lalu Megawati sebagai Presiden RI ke 4 dan 5, lalu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke 6 dengan masa pemerintahan dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Baru tanggal 20 Oktober 2014, Presiden ke 7 Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI ("Presiden dan Wakil Presiden," 2020).

Dalam paper ini tidak membahas Presiden RI dari yang ke 3 hingga ke 6 karena pertimbangan bahwa fokus perhatian pemerintahan ketika Presiden-presiden tersebut bukan pada pengembangan identitas negara terkait arsitektur. Setelah Suharto, bisa dikatakan baru Presiden Jokowi yang memang mengembangkan identitas negara melalui karya arsitektur.

Salah satu program pertama dari perspektif arsitektural di masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama adalah diluncurkannya Sayembara Desain Rumah Wisata yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif bersama Propan Raya pada tanggal 10 November 2014. Gagasan ini kemudian dipertegas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pentingnya mengembalikan jati diri dan identitas budaya lokal dengan ide 'arsitektur nusantara' yang disampaikan di Mandeh, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 10 Oktober 2015 dan di Borobudur, 29 Januari 2016. Tindak lanjut dari gagasan dan arahan Jokowi disusunlah kerjasama antar tiga Lembaga yaitu Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif dan Propan Jaya untuk membuat sayembara desain Arsitektur Nusantara untuk 10 Destinasi Prioritas yang kemudian disebut dengan 10 Bali Baru. Hal ini juga terkait dengan kerjasama Kemenpar dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) untuk membangun 100 ribu homestay di destinasi wisata (Murdaningsih, 2016). Sayembara homestay tersebut kemudian diberi nama Sayembara Desain Rumah Wisata (homestay) Nusantara yang bertujuan untuk memberi kesempatan arsitek untuk turut memajukan arsitektur Nusantara, sekaligus sebagai solusi

guna pengembangan kawasan wisata. 10 destinasi prioritas itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo-Tengger di Jawa Timur, Mandalika di Lombok NTB, Labuan Bajo di Flores NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Morotai di Maluku (Rostanti, 2017).

Apa itu arsitektur nusantara dijabarkan oleh Josef Prijotomo yang membagginya dalam 6 butir (Prijotomo, 2014a) yaitu:

1. Arsitektur nusantara berlandas pada iklim tropis sehingga berwujud pernaungan.
2. Arsitektur nusantara memperhatikan tidak hanya arsitektur di darat tapi juga arsitektur di air.
3. Arsitektur nusantara tanggap terhadap kondisi gempa sehingga material menyusun bangunannya adalah material organik.
4. Arsitektur nusantara itu beraneka ragam.
5. Arsitektur nusantara menempatkan persolekannya di luar bangunan.
6. Arsitektur nusantara banyak ditemui di pedesaan.

Josef Prijotomo juga menjabarkan strategi mengkinikan arsitektur Nusantara yaitu dengan:

1. Bentuk(an) Indonesia sedangkan ruang(an) global; atau
2. Bentuk(an) global sedangkan ruang(an) Indonesia.

Hal yang paling besar skalanya dalam perspektif arsitektur dan kajian urban pada pemerintahan Joko Widodo adalah sayembara Ibu Kota Nasional. Pemenang sayembara desain IKN ini kemudian diumumkan tanggal 23 Desember 2019 dan yang menjadi pemenang adalah Urban + dengan desain bertema 'Nagara Rimba Nusantara' (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2019). Konsep dasar rancangan ini adalah Nagara yang melambangkan pemerintahan yang adil; Rimba yang menunjuk pada lokasi di hutan; dan Nusa sebagai identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (Septiasputri, 2019).

Deskripsi yang mengungkap kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan korelasinya dengan arsitektur terlihat bahwa pemerintahan Jokowi mengedepankan pemikiran lokal dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Nusantara dari Josef Prijotomo. Arsitektur tradisional tidak diterapkan mentah-mentah namun terjadi transformasi arsitektural untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan keperluaannya saat ini. Dalam konteks ibu kota negara yang baru, identitas sebagai

sebuah negara kepulauan dan lokasi di tengah hutan menjadi perhatian utama, walau tidak lagi menggunakan pendekatan arsitektur nusantara, karena skala bahasannya adalah skala perkotaan. Namun titik berangkatnya tetap sama yaitu lokalitas dan kekhasan keadaan geografis Indonesia. Hal yang dinanti adalah perwujudan arsitekturalnya dari desain ibu kota tersebut; apa dan bagaimana pendekatan bentuk arsitekturalnya dari masing-masing gedung fasilitas negara tersebut.

Diskusi

Dalam bagian diskusi ini dijabarkan 2 perspektif diskusi yaitu: perspektif politik identitas terhadap arsitektur dan perspektif perkembangan arsitektur di Indonesia.

Perkembangan Kebijakan Politik Indonesia terhadap Identitas Arsitektur

Deskripsi ketiga Presiden RI diatas terhadap arsitektur terlihat bahwa arsitektur ditempatkan sebagai sarana komunikasi untuk maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan jamannya. Presiden Sukarno menggunakan arsitektur modern, terutama international style di masa 1960an, sebagai simbol kemampuan dan kesetaraan sebuah negara dunia ketiga terhadap negara lainnya. Simbol kemampuan dan kesetaraan ini juga sejalan dengan usaha dan pergerakan politis Sukarno menghimpun negara-negara dunia ketiga dalam Gerakan Non-Blok yang beranggotakan negara-negara yang baru merdeka disekitar tahun 1950-1960an. Pemerintahan Presiden Suharto menempatkan keberagaman arsitektur yang pada tahun 1970 digunakan untuk menunjukkan kemampuan membangun efek dari oil boom dan menunjukkan keluasan wilayah Indonesia sehingga perlu di buat sebuah miniaturnya berupa TMII. Pada masa 1980an, efek krisis ekonomi efek harga minyak yang turun drastic, juga menempatkan keragaman dan ketradisional arsitektur Indonesia, terutama di Bali, sebagai daya tarik pariwisata. Eksotisme alam dan budaya Bali dimaksimalkan untuk mengundang devisa negara dari sector pariwisata yang menggantikan pemasukan dari sektor migas. Di masa pemerintahan Joko Widodo, hal yang serupa terjadi. Berlandas pada arsitektur nusantara versi Josef Prijotomo yang ditempatkan sebagai ciri khas arsitektur Indonesia, dibangunlah sarana dan prasarana penunjang pariwisata terutama yang sudah dijalankan adalah homestay.

Hal diatas bukanlah hal yang sama sekali baru. Kita dengan mudah menemukan ikon-ikon negara/kota yang menggunakan karya

arsitektur. Contoh kasus adalah Menara Eiffel yang dirancang sebenarnya bersifat sementara untuk sebuah acara expo tahun 1889 ("The Eiffel Tower during the 1889 Exposition Universelle," n.d.), namun masih bertahan hingga saat ini dan Opera House di Sydney yang secara biaya konstruksi menghabiskan hampir 14 kali lipat dari anggaran biaya semula (Heaton, 2014). Namun dua contoh itu sampai saat ini menjadi ikon negara/kota dan menghasilkan pemasukan yang luar biasa. Piatkowska menyatakan dengan tegas bahwa "arsitektur saat ini digunakan sebagai sarana pemasaran untuk menciptakan daya saing yang menguntungkan bagi kota terutama pada masa post-globalisasi...Branding tersebut terdiri dari penciptaan gambar yang lebih dikenal, menarik dan ekspresif daripada promosi tentang kesempatan bersaing...hal yang terkait dengan pemasaran berlandas pada *emotional sensation* yang membawa pada persepsi pengalaman sebagai sebuah produk di ranah global yang kemudian mendorong arsitek mengubah citra kota melalui simbol dan intervensi yang berarti" (Piatkowska, 2012). Hal yang lebih tegas lagi tentang peran arsitektur sebagai medium promosi dan penyampai pesan identitas terungkap oleh Muratovski. Arsitektur dapat mempengaruhi pemaknaan budaya suatu tempat, juga dapat dipandang sebagai salah satu 'kendaraan' untuk mengekspresikan identitas nasional(istik). Murstovski menjabarkan bahwa propaganda arsitektur telah terjadi sejak Yunani, Mesir kuno hingga ke masa kota waterfront di Dubai. Pada kesimpulan ternyata bahwa city branding jangan dilihat sebagai sebuah proses yang bertujuan menjual kota, namun sebagai proses meningkatkan status kota dan kehidupan penduduknya yang perlu memperhatikan aspek sosial, budaya, politik dan lingkungan serta praktek ekonomi riil (Muratovski, 2012).

Penjelasan Piatkowska dan Muratovski diatas, walau dalam konteks kota/urban, seakan menyetujui langkah-langkah dari Presiden RI dalam menempatkan arsitektur sebagai sarana komunikasi branding ke-Indonesia-annya sesuai dengan tuntutan jaman. Persamaan yang lain dari pendekatan arsitektur yang digunakan oleh ketiga Presiden RI diatas adalah menempatkan arsitektur sebagai penarik perhatian bangsa lain. Presiden Sukarno menempatkan arsitektur sebagai branding kemampuan dan kesetaraan yang diperlukan sebagai salah satu sarana diplomasi kedudukan dan pembuktian bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak lagi

berada dalam jajahan Belanda. Presiden Suharto menggunakan branding keberagaman dan ketradisional agar menarik perhatian investor, terutama dalam jabaran kasus disini adalah sektor pariwisata. Suharto mengedepankan eksotik budaya dan alam Indonesia. Masa Presiden Joko Widodo nampaknya melanjutkan trend devisa dari sektor wisata dan tidak hanya terfokus pada Bali semata, serta tidak hanya menyasar wisatawan luar negeri tapi juga wisatawan dalam negeri. Konsekuensinya ada kompromi antara eksotika tradisi dan modernitas fasilitas-fasilitas wisata. Dua hal ini kemudian dipertemukan dalam pemahaman arsitektur nusantara.

Pemilihan Pendekatan Arsitektur dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Arsitektur Global

Paper ini mempertanyakan hal apa saja yang kemungkinan – karena sifatnya spekulatif – pemilihan pendekatan arsitektur modern masa Sukarno? Apa itu arsitektur modern dan apa saja yang dimodifikasi disini? Apa latar belakang yang mempengaruhi arsitek masa Sukarno juga memilih pendekatan ini? Atau singkatnya melihat faktor di luar Indonesia yang – kemungkinan - berperan serta dalam penentuan suatu pendekatan yang dipilih dalam suatu masa pemerintahan.

Kajian tentang keterkaitan perkembangan pemikiran Sukarno dengan perkembangan arsitektur dan politik dunia telah diulas dengan sangat detail oleh Abidin Kusno dengan judul 'Di bawah bayangan Bung Karno: Arsitektur Modernis dan Sejarah Kita'. Hal yang menarik dalam spekulasi Kusno – terungkap dengan penggunaan kata 'mungkin' –adalah bahwa Sukarno terpapar modernitas ala Wolff Schoemaker sebab Sukarno pernah magang di kantor Schoemaker dan juga pengaruh 'supralokal' gaya Maclaime Pont karena gaya arsitektur kampus TH Bandoeng yang menurut Pont bergaya Sunda Besar. Dengan demikian arsitektur modern Sukarno berbeda dengan modern ala Le Corbusier, Walter Gropius dan Mies van der Rohe. Pemahaman arsitektur modern dalam perspektif Sukarno terungkap nyata dalam kasus Masjid Istiqlal. Kusno mengutip pernyataan Sukarno bahwa Masjid tersebut 'jang dibuat dari beton jang tahan gempa dan tahan keritikannya zaman' (Kusno, 2012). F.Silaban sebagai perancang dan dipercaya memimpin pembangunan Masjid besar ini mempertegas pernyataan Sukarno diatas dengan pernyataan: "Arsitektur Istiqlal itu asli, tidak meniru dari mana-mana, tetapi juga tidak tahu dari mana datangnya. Patokan

saya dalam merancang hanyalah kaidah-kaidah arsitektur yang sesuai dengan iklim Indonesia dan berdasarkan apa yang dikehendaki orang Islam terhadap sebuah masjid" (Kuwado, 2019). Kusno kemudian melanjutkan bahasannya dari sudut pandang praksis dengan menampilkan keterkaguman Sukarno terhadap rancangan Brazilia yang oleh Kusno di pandang sebagai manifestasi pemikiran CIAM terhadap sebuah kota modern dan membandingkan dengan perkembangan kota Jakarta. Kusno membuat ulasan dengan pernyataan "ruang modernis Jakarta bukanlah tempat memberi pesan, tetap ruang itu sendiri adalah pesan (suatu teks) yang kalau sudah dimengerti silahkan beraksi dan jalan terus ke dimensi berikutnya.... Bangunan-bangunan hanyalah titik berangkat atau batu loncatan ke masa depan dan suatu gertakan awal yang diperlukan untuk gertakan berikutnya dan seterusnya sehingga 'revolusi' dan pembaharuan dapat berjalan terus' (Kusno, 2012). Disisi lain, diawal kemerdekaan RI proyek 'mercusuar' yang digagas oleh Sukarno didanai oleh hasil pampasan perang Jepang. Namun lebih dari itu, Jakarta ditempatkan Sukarno sebagai etalase kemampuan terkini arsitektur dunia saat itu. Hotel Indonesia dirancang oleh Abel dan Windy Sorenson, pasangan arsitek dari Amerika Serikat. Gelora Bung Karno yang mendapat bantuan dari satu tim beranggotakan 20 orang, dipimpin oleh R. Semerdjiev dari Uni Soviet (Ardhiati, 2013). Gelora Bung Karno yang mendapat bantuan dari satu tim beranggotakan 20 orang, dipimpin oleh R. Semerdjiev dari Uni Soviet (Mundakir, 2018). Ini juga bisa menjadi alasan teknis mengapa Sukarno kemudian menempatkan arsitektur modern sebagai 'sarana komunikasi' politiknya.

Di periode yang hampir bersamaan dengan puncak kejayaan Sukarno dengan karya-karya 'mercusuarnya', di Delft Belanda muncul kelompok ATAP yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa arsitektur dan seni Indonesia yang sedang belajar di TH Delft dan Akademi seni Amsterdam. Mereka adalah Sujudi, Han Awal, Suwondo B. Sutedjo, Bianpoen, Mustafa Pamuntjak, Oei King Han, Harry Go, Krisno Nimpuno, Thung Po Hin, Sein, Wanjin, The Ek Pouw, Lie Kwie Bouw. Nama ATAP dipilih karena dianggap mewakili karakter paling kuat dan merepresentasikan arsitektur yang berkembang di tanah air. Bianpoen dan Suwondo memberikan pernyataan yang kurang lebih menyetujui pemikiran F. Silaban untuk tidak perlu meniru atau membuat bentuk khas arsitektur suku-suku yang ada di Indonesia, tapi justru mengambil jiwanya.

Lebih detail Bianpoen menyatakan bahwa unsur-unsur daerah seakan-akan merubah dirinya untuk hidup bersama dengan unsur-unsur yang lain dalam suasana baru. Perpaduan unsur-unsur dari berbagai tempat ini memberi kesan bahwa Indonesia adalah suatu yang perlu dikomposisikan bukan sesuatu yang sudah ada. Pemikiran ini kemudian terwujud nyata dalam beberapa karya Han Awal dan Sujudi. Tahun 1964, Sujudi mengajak Han Awal berkolaborasi dalam proyek CONEFO. Dalam perkembangan selanjutnya Sujudi mendirikan biro arsitek Gubah Laras; Han Awal dan Mustafa Pamuntjak mendirikan biro arsitek Han Awal and Patners di awal 1970. Suwondo kemudian mengajar di jurusan arsitektur Universitas Indonesia, Bianpoen pada perjalanan kariernya bekerja di Pemerintah DKI Jakarta dan setelah itu juga mengajar di UI yang kemudian dikenal dengan salah satu pelopor pengembangan ilmu lingkungan di Indonesia (Herlambang, 2012).

Di masa berikutnya, hal yang bisa dicermati adalah terbentuknya kelompok Atelier Enam justru berawal dari pertemuan mereka di proyek CONEFO dibawah Soejoedi, dan tentunya pernah berkomunikasi dengan Han Awal. Mereka berenam juga murid dari Van Romondt, seperti halnya Sukarno. Namun keterhubungan itu tidak muncul dalam ekspresi bentukan dan proses berpikir arsitekturalnya terutama di masa-masa pemerintahan Suharto. Ada dua kemungkinan yang terjadi: Atelier Enam secara mandiri dan kesadaran penuh mengembangkan pemikiran berdasar pada arsitektur tradisional Indonesia, atau faktor 'permintaan/perintah' dari pemberi tugas dan aspek politik masa Suharto yang lebih dominan. Ketertarikan Atelier Enam pada arsitektur tradisional sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali aneh, karena contoh-contoh kasus arsitektural di masa sebelumnya terutama karya Maclaime Pont, Karsten dan arahan Van Romondt bisa jadi pemicu munculnya kesadaran tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan arsitektur modern yang dikembangkan oleh Sukarno dalam karya-karya monumentalnya bukan seperti arsitektur modern kelompok CIAM, masih terdapat irisan dan pengaruh art deco dan art and craft seperti yang dibawa oleh arsitek Belanda di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Jika kemudian kita memperhatikan perkembangan arsitektur dunia, maka pada tahun 1975 terjadi perubahan cara memandang arsitektur yaitu dengan

munculnya postmodern. Robert Ventury tahun 1966 menerbitkan buku berjudul '*Complexity and Contradiction in Architecture*' yang dalam sebuah review Martino Stierli menyatakan bahwa ada kejenuhan terhadap arsitektur minimalis dan paradigma abstrak terhadap arsitektur modern pasca Perang Dunia, dan Ventury walau berpendirian bahwa dirinya seorang modernis, namun buku *Complexity and Contradiction* dan juga *Learning from Las Vegas* yang terbit tahun 1972 masuk dalam kategori buku 'teks' untuk wacana arsitektur Postmodern (Stierli, 2016). Tahun 1976 terbit buku berjudul *The Failure Of Modern Architecture* karangan Brent C Brolin yang dalam pembukaannya diungkap bahwa arsitektur modern menghadapi masalah yang mereka tidak siap menyelesaikannya, yaitu masalah penerimaan secara universal terhadap arsitektur modern tidak pernah terjadi setelah lima puluh tahun indoktrinasi yang dilakukan arsitektur modern; alasan selanjutnya kegagalan arsitektur modern dan perencanaannya diakibatkan pengabaian terhadap nilai sosial dan pemahaman estetika penggunaannya (Brolin, 1976). Jika diperhatikan 'pemilihan' pendekatan arsitektur oleh Suharto nampaknya tidak semata-mata karena ingin berbeda dengan pendekatan arsitektural masa pemerintahan Sukarno karena perkembangan arsitektur global saat itu mengarah 'kembali' ke nilai-nilai lokal dan lebih personal. Namun perlu diingat bahwa pendekatan arsitektur modern masa Sukarno bukan mengacu pada gaya internasional model Corbu, van de Rohe, dan Walter Groupius.

Masuk pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hal yang paling mencolok pada masa ini adalah penggunaan pengetahuan 'arsitektur nusantara' versi Josef Prijotomo. Hal yang perlu ditegaskan diawal – yang juga diakui oleh Prijotomo – adalah pemahaman arsitektur nusantara ada beberapa versi pemahaman yaitu ada nama Mangunwijaya dan Galih Widjil Pangarsa yang juga menyatakan pengetahuan arsitektur bumi pertiwi (baca Indonesia) (Prijotomo, 2021). Octavia dalam papernya menggolongkan pemikiran Prijotomo dalam satu paham dengan pemikiran Galih Widjil Pangarsa dalam konteks arsitektur nusantara (Octavia & Prijotomo, 2018). Mari kita anggap ada dua sumber pengetahuan arsitektur nusantara yaitu versi Josef Prijotomo - Galih Widjil Pangarsa dan versi Manguwijaya, seperti yang terungkap dalam buku Wastu Citra.

Mari kita fokus pada akar pemikiran Josef Prijotomo. Telah dijabarkan dalam Octavia

bahwa arsitektur nusantara bukan arsitektur tradisional dan bukan arsitektur vernacular. Arsitektur Tradisional mengacu pada pemikiran Amos Rapoport yang menulis buku 'House, Form and Culture' tahun 1969, yang kemudian digolongkan masuk dalam ilmu pengetahuan geografi; lalu juga ada pemikiran Roxana Waterson yang menulis buku '*The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*' yang kemudian digolongkan dalam pengetahuan antropologi. Lalu bagaimana dengan arsitektur vernacular? Octavia meletakkan dasarnya pemikiran arsitektur vernacular pada pemikiran Paul Oliver dan Bernard Rudofsky yang secara singkat merupakan arsitektur – rakyat – yang berorientasi pada potensi lokal yang dimiliki oleh lingkungannya atau dengan kata lain mencerminkan lokalitas yang sangat kuat (Octavia & Prijotomo, 2018).

Lalu bagaimana dengan praksis arsitektur nusantara? Prijotomo dalam strategi dan teknik mengkininya meminjam cara berpikir Robert AM Stern yang tertulis dalam buku 'modern classicism', sebuah kajian tentang arsitektur purnamodern yang termasuk dalam pendekatan postmodern (Prijotomo, 2014b). Robert AM. Stern, mantan dekan di Yale School of Architecture dan menyebut dirinya seorang modern-tradisionalist dengan pernyataan: *can one speak the local language of architecture in a fresh way?* (Whelan, 2017). Dengan deskripsi latar belakang ini maka yang menjadi dasar pemikiran dari Robert AM Stern – yang kemudian tertuang dalam buku *Modern Classicism* terbit tahun 1988 – tidak berbeda jauh secara dasar / konsep pemikiran waktu TH Bandoeng didirikan, terutama pada pemikiran Van Romondt, Maclaine Pont dan Karsten yang berangkat dari hal yang tradisi dan bertemu dengan yang modern – terkini. Prijotomo pernah menulis secara khusus fenomena pertemuan pemikiran 'barat dan timur' dalam perspektif arsitektur dalam paper berjudul *When west meets east: One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s)* (Prijotomo, 1996). Pada bagian akhir paper tersebut, Prijotomo mempertanyakan tentang situasi yang kondusif dan mendukung pengembangan pemikiran berbasis budaya. Mungkin pertanyaan tersebut telah mulai terjawab pada masa pemerintahan Joko Widodo, sebab basis pengetahuannya berlandas pada pengetahuan Arsitektur Nusantara. Prijotomo tidak berpraktek merancang secara profesional seperti Mangunwijaya, namun pemikiran tentang arsitektur nusantara di dukung oleh Yori Antar. Hal yang menarik adalah Yori Antar adalah

anak dari Han Awal dan punya hubungan dekat dengan Mangunwijaya. Yori Antar juga penggagas kelompok diskusi Arsitek Muda Indonesia yang mulai kiprahnya sekitar tahun 1990 (Armand, 2018) dan kini anggota AMI menjadi 'motor' keberadaan arsitektur di Indonesia di dunia professional praktek arsitek.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah :

- Arsitektur dan Politik

Hal yang perlu dicermati adalah bagaimana perkembangan arsitektur di Indonesia di masa depan. Sebab dari jabaran diatas keberadaan arsitektur sangat bergantung pada kebijakan politik dan pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Dalam konteks politik, identitas arsitektur diletakkan sebagai sarana komunikasi dan 'branding', hal itu juga bergantung pada pengambilan posisi politik-ekonomi dari pemerintah saat berkuasa.

- Arsitektur Indonesia dan perkembangannya

Disisi arsitektur sendiri, tentang identitas tidak banyak perubahan berarti dari masa Hindia Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Tarik menarik antara modern dan tradisional masih saja terjadi. Hal yang wajar, sebab di perkembangan arsitektur global juga terjadi hal yang sama dari perspektif estetika wujud arsitektur. Paper ini memang hanya menyajikan hal-hal yang sifatnya spekulatif dan dangkal, perlu ada pendalaman dan detail pembahasan lanjutan dan melibatkan perspektif keilmuan yang lebih luas.

Hal lain yang didapat dari deskripsi tersebut adalah masa depan arsitektur Indonesia. Kurniawan telah menyatakan bahwa ada hal-hal yang lebih utama daripada sekedar memperdebatkan identitas yaitu permasalahan sosial budaya dan perekonomian masyarakat dalam konteks luas (Kurniawan, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, J. (2018). Mencari DNA Arsitektur di Nusantara. *Seminar Arsitektur Nusantara IPLBI 2018*, (May), 15–22.
- Ardhiati, Y. (2005). *Bung Karno Sang Arsitek: Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, Kria, Simbol, Model Busana dan Teks Pidato 1926-1965*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ardhiati, Y. (2012). *Panggung Indonesia: Khora Pesona karya 'arsitek' Soekarno 1960*. Universitas Indonesia.
- Ardhiati, Y. (2013). The Idea of "Architecture Stage": A Non-material Architecture Theory. *Journal of Civil Engineering and Architecture*, 7(10), 1323–1328.

<https://doi.org/10.17265/1934-7359/2013.10.015>

- Armand, A. (2018). *Arsitek Muda Indonesia: Media, Sebelum Arsitektur*.
- Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2019). *Konsep Nagara Rimba Nusa Jadi Pemenang Lomba Desain Ibu Kota Negara Baru*.
- Britannica, T. E. of E. (2020). *semiotics*.
- Brolin, B. C. (1976). *The Failure of Modern Architecture*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Dakung, S. (1982). *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY.
- Fitra, D. (2020). 27 Maret 1968 Soeharto Resmi sebagai Presiden RI Ke-2.
- Hanggoro, H. T. (n.d.). *Gagasan Awal Taman Mini Indonesia Indah*.
- Hanum, N. N. ... Kurniawan, K. R. (2020). Concrete: Politics in the Development of Modern Architecture in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012009>
- Heaton, A. (2014). *Opera House Named to Over-Budget Hall of Shame*.
- Herlambang, S. (2012). ATAP, Delft, 1953-1957: kisah kecil tentang kelompok diskusi, perjalanan arsitektur dan persemaian arsitek modern Indonesia. In *Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia* (pp. 97–107). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia. (n.d.).
- Kurniawan, K. R. (2018). Dinamika Arsitektur Indonesia dan Representasi Politik Identitas Pasca Reformasi. *Nalars: Jurnal Arsitektur FT-UMJ*, 17(1), 65–78.
- Kusno, A. (2012). Di Bawah Bayangan Bung Karno: Arsitektur Modernis dan Sejarah Kita. In *Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia* (pp. 64–79). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuwado, F. J. (2019). *Kisah Friedrich Silaban, Anak Pendeta yang Rancang Masjid Istiqlal*.
- Leach, N. (1997). *Rethinking architecture: A reader in cultural theory*. London: Routledge.
- Marwati, A. (2012). *Soekarno dan Soeharto dalam Arsitektur*. Depok.
- Moersid, A. (2012). *Atelier 6 tentang Atelier 6*. In *Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia*.

- Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mundakir, D. (2018). Menciptakan Kejayaan, Nasionalisme dan Internationalisme sejak Aisan Games 1962. In *Gelora Bung Karno Asian Games*. Jakarta: IMAJI.
- Muratovski, G. (2012). The role of architecture and integrated design in city branding. *Place Branding and Public Diplomacy*, 8(3), 195–207.
- Murdaningsih, D. (2016). Ini 10 Pemenang Lomba Desain Arsitektur Nusantara. *Republika.Co.Id*.
- Nugraha, P. (2018). Tentang 999 “Masjid Pancasila” yang Dibangun Soeharto.
- Octavia, L., & Prijotomo, J. (2018). Arsitektur Nusantara bukan Arsitektur Tradisional maupun Arsitektur Vernacular. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 7(4), 249–253.
- Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter. (n.d.).
- Pangarsa, G. W. (2006). *Merah Putih Arsitektur Nusantara*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pellegrino, P. (2006). *Semiotics of Architecture*. In: Keith Brown, (Editor-in-Chief) *Encyclopedia of Language & Linguistics* (2nd ed.). Oxford: Elsevier.
- Piatkowska, K. K. (2012). Economy and architecture. The role of architecture in process of building the economic potential of space. *Humanities and Social Sciences Review*, 1(2), 549–555.
- Pranajaya, I. K. (2018). Merangkul Masa Lalu Dan Masa Kini Dengan Cara Yang Etis Untuk Mendapatkan Hasil Karya Estetis. *Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi*, 24–35. Institut Desain dan Bisnis Bali.
- Presiden dan Wakil Presiden. (2020).
- Prijotomo, J. (1996). When west meets east: One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s). *Architronic*, 5(3).
- Prijotomo, J. (2014a). Mengenal (kembali) Arsitektur Nusantara. In *Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara* (pp. 16–19). Jakarta: Prima Info Sarana Media.
- Prijotomo, J. (2014b). Strategi dan Teknik meng-Kini Arsitektur Nusantara. In *Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara*. Jakarta: Prima Info Sarana Media.
- Prijotomo, J. (2021). 21 Butir Pengetahuan Arsitektur Nusantara. *Webinar Mosaik-Mosaik Arsitektur Nusantara Seri 01*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Purnaya, I. G. K. (2015). Relasi Kuasa Pascareformasi dalam Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(1).
- Purwestri, N., & Widyarta, M. N. (2012). Mencari Lokalitas: Atelier 6, Y.B. Mangunwijaya dan Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia,. In *Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, G. M. (2015a). Arsitektur Bali pasca Hasta Kosala Kosali dan Hasta Bhumi: Menyimak Peran dan Karya Ida Bagus Tugur dan Robi Sularto.
- Putra, G. M. (2015b). Muller, Bawa dan Hill dalam Transformasi Arsitektur Bali.
- Rostanti, Q. (2017, August). Anda Arsitek? Yuk Ikutan Sayembara Desain Restoran Nusantara. *Republika.Co.Id*.
- Septiasputri, M. D. (2019). Ini Arti Konsep “Nagara Rimba Nusa” Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota.
- Silaban. (1982). Idealisme Arsitektur dan Kenyataan di Indonesia. In E. Budihardjo (Ed.), *Menuju Arsitektur Indonesia* (p. 84). Bandung: Alumni.
- Simone, A. M. (2012). Introduction: Enacting Modernity. In C. Greig Crysler; Stephen Cairns; Hilde Heynen (Ed.), *The SAGE Handbook of Architectural Theory* (1st editio, p. 201). SAGE Publications Ltd.
- Sitompul, M. (n.d.). Ketika Sukarno Enggan Berperang Melawan Soeharto.
- Stierli, M. (2016, December). ‘Complexity and Contradiction changed how we look at, think and talk about architecture.’ *Architectural Review*.
- Sukada, B. (2011). *Membuka Selubung Cakrawala Arsitek Soejoedi*. Jakarta: Gubah Laras, Arsitek dan Perencana.
- Sumarno, P., & Rasona, A. (1983). *Pengetahuan Pendalangan 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY.
- Tentang TMII. (2016). The Eiffel Tower during the 1889 Exposition Universelle. (n.d.).
- Whelan, J. (2017, May). Spotlight: Robert A.M. Stern. *Archdaily*.
- Yari, F., & Mansouri, S. (2017). Political architecture and relation between architecture and power. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 01(03), 84–90.